

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Bumdes Perlu Direvitalisasi
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Bandung Barat
Sumber / Hal	: Galamedia/Hal.7
Edisi	: Kamis, 12 Juli 2018

## Bumdes Perlu Direvitalisasi

### NGAMPRAH, (GM).-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat telah merevitalisasi seluruh badan usaha milik desa (bumdes) secara bertahap. Sejak 2009 sampai 2013, telah dilaksanakan revitalisasi terhadap 165 bumdes.

"Kami memberikan bantuan modal sebesar Rp 25 juta untuk setiap bumdes," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KBB, Wandiana di Ngamprah, belum lama ini.

Wandiana mengakui, pada kenyataannya pemerintah desa masih belum optimal dalam mengelola bumdes. Namun, seiring dengan kucuran dana desa yang begitu besar, ia meminta pemerintah desa lebih aktif dalam mengoptimalkan bumdes. UU Nomor 6/2014 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4/2015 juga memuat aturan yang menyangkut bumdes.

"Dengan kondisi tersebut, desa sudah tidak sepatutnya membiasakan diri menunggu uluran tangan dari pemerintah kabupaten, provinsi atau pusat untuk mendapatkan bantuan stimulan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan desa, khususnya yang menyangkut pengembangan bumdes," kata Wandiana.

Wandiana menekankan, pembentukan bumdes bersama atau bumdes antardesa merupakan inovasi dalam pembangunan dan pemberdayaan desa. Dengan mengikutsertakan unit pelaksana kegiatan pada program PNPM Mandiri Perdesaan, bumdes-bumdes yang sudah ada dapat sekaligus direvitalisasi.

"Program ini dibuat dengan maksud untuk menyinergikan kegiatan ekonomi desa, sekaligus menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat untuk melestarikan program dan pengelolaan aset hasil dari kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, salah satu program unggulannya yaitu kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Ekonomi," paparnya.

### Peran aktif

Wandiana mengingatkan, para pemangku kepentingan di desa harus berperan aktif dalam memajukan perekonomian di daerahnya, sehingga kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meningkat. Di antaranya dengan mengembangkan bumdes.

Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir ini, pemerintah telah menggulirkan berbagai program di desa. Termasuk di antaranya program-program yang dapat menjadi fondasi bagi pembentukan *holding* bumdes bersama.

"Kepala desa, ketua bumdes, pendamping desa dan pendamping lokal desa, badan kerja sama antardesa (BKAD), dan unit pengelola kegiatan diharapkan berpartisipasi dalam menyukseskan program unggulan ini untuk kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa di Bandung Barat," kata Wandiana.

Dia memaparkan, jauh sebelum UU Nomor 6/2014 tentang Desa ditetapkan, Pemkab Bandung Barat telah fokus terhadap pembangunan di desa. Melalui alokasi dana desa, Pemkab Bandung Barat berupaya menaruh perhatian terhadap penguatan ekonomi desa. Salah satunya melalui pemberdayaan bumdes.

"Beberapa kebijakan Pemkab Bandung Barat dalam pengembangan bumdes, di antaranya melalui dukungan regulasi, yaitu Perbup Bandung Barat Nomor 31/2016. Perbup itu diterbitkan untuk mengatur tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran bumdes," katanya. (B.104)\*\*